

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. *Pemidanaan*. Medan: USU Press. 2011.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2021.
- Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Anis Widyati dan Ade Adhari. *Hukum Penitensir di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- A. Josias Simon Runtuntutambi dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indoneisa. 2015.
- Aris Prio Agus Santoso dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2022.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co. 1992.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Dwidja Prianto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, ed. Revisi. Yohyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016.
- Fahmiron. *Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Hanafi Armani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Ishaq. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Press. 2023.

J. Djohansajah. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc. 2008.

Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.

Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish. 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2010.

Muchtar Kusumaaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2006.

Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2020.

P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

_____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2005.

Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Serlika Aprita, Reny Okprianti dan Yudistira. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2024.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.

_____. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.

C. Jurnal

Andre Arvendo, I Ketut Seregig dan Ansori. *Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Mempertgunakan Senjata Api Rakitan Secara Illegal*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6 (Desember, 2022).

Ajeng Arindita, Pujiyono dan Purwoto. *Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang*. Dipenogor Law Journal. Vol. 8. No. 3. 2019.

Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN. (November, 2011).

Lisa Andriani, dkk. *Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Ditinjau dari Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7 (Desember, 2022).

Livia musfika Santi. *Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Hukum Acara.

Linje Anna Marpaung, Endang Prasetyawati dan Muhammad Septa Sanjaya, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Illegal*. Journal of Law. Vol. 4 (Januari, 2023).

M. Syahrul Borman. *Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia*. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. (Juli, 2017).

Nanang Tomi Sitorus. *Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana*. Journal of Law. (November, 2020).

Nor Fadillah. *Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai Verifikasi Partai Politik*. Lex Renaissance. Vol. 8. No. 1 (Juni, 2023).

Rahmi Zilvia, Haryadi. *Disparitas Pidana terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. Journal of Criminal Law. Vol. 1 (Februari, 2020).

Sutarni. *Manusia, Moralitas dan Hukum*. Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18. No. 1. 2018.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 45/Pid.sus/2021/PN Srl

E. Tesis

Ulfah. *Efektivitas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Mmemberikan Pelayanan terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama I A Medan*. Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Website atau Internet

EMP Pusiknas Bareskrim Polri, <https://pusiknas.polri.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

Heylaw. <https://heylaw.id/blog/asas-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman>. Diakses pada tanggal 24 April 2024

Kementrian Keuangan, PENJELASAN (kemenkeu.go.id). Diakses pada tanggal 27 April 2024

Mabes Polri. <https://mediahub.polri.go.id/document/detail/29211-ketentuan-hukum-kepemilikan-senjata-api-antara-regulasi-dan-ancaman-pidana>. Diakses pada tanggal 29 April 2024.

Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>

